

KONSEP MASYARAKAT MADANI

(Telaah Atas Pemikiran Nurcholish Madjid)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. HM. Bahri Ghozali, MA

NIP. 150220788

Disusun Oleh :

AHMAD BUSTARI

NIM. 00230096

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

FAKULTAS DAKWAH UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2004

DOSEN FAKULTAS DAKWAH
UIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Bustari

Kepada Yang Terhormat
Bpk Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan bimbingan, pengarahan dan koreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Ahmad Bustari
NIM : 00230096
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Konsep Masyarakat Madani Telaah Atas Pemikiran
Nurcholis Madjid


Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi ini sudah siap untuk diajukan pada Sidang Munaqosah

Demikian persetujuan ini kami beritahukan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Desember 2004

Pembimbing


Prof/Dr/HM. Bahri Ghozali, MA

NIP : 150220788

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

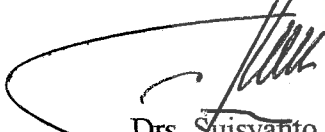
KONSEP MASYARAKAT MADANI *(Telaah Atas Pemikiran Nurcholish Madjid)*

Yang disusun oleh

AHMAD BUSTARI
NIM : 00230096

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada tanggal 13 Januari 2005 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S. Sos. I)

Ketua Sidang




Drs. Suisyanto, M.Pd
NIP. 150228025

Sekretaris Sidang



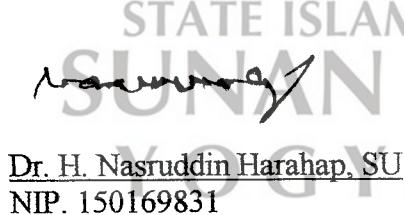
Drs. Moh Abu Suhud, M. Pd
NIP. 150241646

Penguji I/ Pembimbing



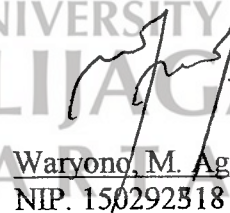
Prof. Dr. HM. Bahri Ghozali, MA
NIP. 150220788

Penguji II



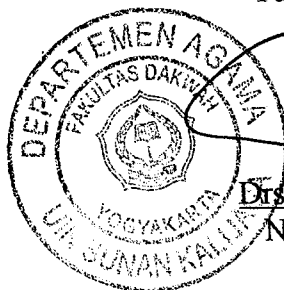
Dr. H. Nasruddin Harahap, SU
NIP. 150169831

Penguji III



Waryono, M. Ag
NIP. 150292318

Yogyakarta, 20 Pebruari 2005
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah
Dekan



Drs. Afif Rifa'i, MS
NIP. 150222293

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ
أَن لاَّ يَغْيِرَ مَا بَقُومَ حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بَاتَفَسَهُمْ .
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلا مٍ دَلَّهُ .

وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِّنْ وَالٍ .

(الرعد . ١١)

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah ni'mat yang ada pada suatu kaum (kecuali) bila mereka sendiri merubah keadaannya.

Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya;

dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.

(QS. Ar-Ra'd : 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan buat:

- *Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang tak mengenal lelah dalam bekerja demi untuk membiayai kuliah anandanya dan tak mengenal putus asa dalam membimbing dan menasehati anaknya agar menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama.*
- *Ayunda dan adinda-adinda tersayang yang telah memberi semangat dalam hidup saya untuk selalu berusaha, bekerja keras dan selalu mengambil pelajaran atau hikmah terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan ini*
- *Sahabat- sahabatku seperjuangan di Yogyakarta yang selalu bersama dalam suka maupun duka*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Rasa syukur tiada henti saya munajatkan kehadiran-Nya, karena atas Hidayah dan Rahmat-Nya skripsi yang berjudul : “Konsep Masyarakat Madani; Telaah Atas Pemikiran Nurcholish Madjid” dapat saya rampungkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Sosial Islam (Dakwah) pada Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan terimah kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bpk. Drs. Afif Rifa'i, MS., selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Suisyanto, M. Pd, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Bpk. Prof. Dr. HM. Bahri Ghozali, MA., Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersusah payah mencurahkan tenaga, pikiran, serta waktunya guna membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis,

semoga apa yang telah diberikan menjadikan amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT.

5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tak terhingga
6. Teman tersayang diwaktu suka dan duka, Muthi' Abidah yang senantiasa memahami dan mengerti situasi dan kondisi penulis. Teman seperjuangan Muslim Kawilarang, Winarto, Andi Hartoyo, Ramlan, Arbain, Asy'ari, Hamim, Agus, dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas jasa baik dan bantuan kalian. Semoga semua bantuan dan amal baik yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah. Dan dijadikan sebagai amal saleh di sisi-Nya.

Selanjutnya, penulis menyadari akan kelemahan dan kekurangan skripsi ini dan dengan lapang dada penulis menunggu dan menerima saran-saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini dan kebaikan kita bersama.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis memohon semoga skripsi yang sangat sederhana ini bisa membawa manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pencinta ilmu untuk terus maju dalam menimba ilmu hingga ke akhir hayat.

Yogyakarta, 20 Desember 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL – i

HALAMAN NOTA DINAS – ii

HALAMAN PENGESAHAN – iii

HALAMAN MOTTO – iv

HALAMAN PERSEMBAHAN – v

KATA PENGANTAR – vi

DAFTAR ISI – viii

BAB I. PENDAHULUAN – 1

- A. Penegasan Judul ---- 1
- B. Latar Belakang Masalah ---- 3
- C. Rumusan Masalah ---- 9
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ---- 9
- E. Kajian Pustaka ---- 10
- F. Metode Penelitian ---- 18
- G. Sistematika Pembahasan ---- 20

BAB II. BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID – 22

- A. Riwayat Hidup dan Pendidikan ---- 22
- B. Gambaran Umum Kehidupan Keagamaan, Politik, Sosial,
Ekonomi ---- 26
- C. Tokoh-tokoh Pemikir yang Mempengaruhinya dan Corak
Pemikirannya ---- 33
- D. Karya-karya Intelektual ---- 38

**BAB III. PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG MASYARAKAT
MADANI DAN PROSPEK PEMBENTUKANNYA DI INDONESIA –**

— 42

- A. Konsep Masyarakat Madani Nurcholish Madjid — 42
 - 1. Pengertian Masyarakat Madani ---- 42
 - 2. Karakteristik Masyarakat Madani ---- 48
 - a. Keadilan Sosial ---- 49
 - b. Demokratis ---- 53
 - c. Hak Asasi Manusia (HAM) ---- 58
 - d. Toleransi ---- 64
 - e. Pluralisme ---- 69
- B. Masyarakat Madani dan Prospek Pembentukannya di Indonesia — 72
 - 1. Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid ---- 72
 - 2. Prospek Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia — 79

BABIV PENUTUP ---- 84

- A. Kesimpulan ---- 84
- B. Saran-saran ---- 85

DAFTAR PUSTAKA ---- 86

CURICULLUM VITAE — 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN — 91



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman arti dan penafsiran terhadap judul di atas, maka perlu ditegaskan dengan menguraikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sehingga akan diperoleh suatu pemahaman yang sesuai dengan apa yang dimaksud dengan tepat dan benar.

Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan dalam judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Konsep

Kata konsep di dalam kamus Ilmiah Populer artinya ide umum, pemikiran, pengertian, rencana dasar atau rancangan¹ Dengan demikian yang dimaksud konsep dalam pembahasan ini ialah segala atau semua pemikiran, ide, pengertian, dan rancangan tentang masyarakat madani yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid.

2. Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani di Indonesia pertamakali dikenalkan oleh Asisten Perdana Menteri Malaysia, Dato Anwar Ibrahim dalam Festival Istiqlal 1995. Disini kesimpulannya tentang prinsip dan ide mendasar tentang masyarakat

¹Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arkola, 1994), hlm. 362

madani yaitu prinsip moral, keadilan, keseksamaan, musyawarah, dan demokrasi. Yang mana agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya dan masyarakat kota adalah hasilnya. Dengan demikian, maka *civil society* diterjemahkan sebagai "masyarakat madani" yang mengandung tiga hal yakni agama, peradaban, dan perkotaan.²

Dalam perspektif Islam masyarakat madani adalah masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan umum, yang disebut Al-Khair.³ Dasar utama masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindari diri dari suatu konflik, dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.⁴

3. Telaah

Telaah adalah penyelidikan, pemeriksaan atau penelitian.⁵ Yang dimaksud telaah dalam pembahasan ini adalah penyelidikan atau penelitian terhadap pemikiran, gagasan atau pandangan Nurcholis Madjid tentang masyarakat madani

4. Pemikiran Nurcholis Madjid

Yang dimaksud pemikiran Nurcholis Madjid disini adalah semua bentuk pendapat, ide, gagasan, pemahaman atau hasil pemikiran Nurcholis Madjid

²Baca, Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*, (Yogyakarta, LP2IF & Pustaka Pelajar, 2001) hlm. 95. lihat juga Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani; Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, LP3ES, 1999), hlm. 146

³Baca, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surat Ali Imran, 103-104

⁴Dawam Raharjo, *op cit.*, hlm. 152

⁵Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta, Modern English Press, 1991), hlm. 1567

tentang masyarakat madani dan bagaimana upaya pembentukannya dalam masyarakat.

Dengan demikian maksud dari judul " Konsep Masyarakat Madani (Telaah atas pemikiran Nurcholis Madjid)" di atas adalah meneliti, menyelidiki, mengkaji atau menelaah gagasan-gagasan, ide, pendapat atau pemikiran-pemikiran Nurcholis Madjid tentang masyarakat madani dan bagaimana upaya pembentukannya dalam masyarakat Khususnya masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki landasan teologis dan humanis sebagaimana halnya yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw waktu membangun dan mengembangkan masyarakat madinah.

B. Latar Belakang Masalah

Ti adanya tatanan sosial yang mapan bisa menghancurkan kehidupan berbangsa, menghancurkan demokrasi dan menghilangkan keadilan, kemerdekaan, persamaan serta hak asasi manusia lainnya. Pengalaman perjalanan sejarah bangsa Indonesia selama lebih setengah abad menunjukkan ketiadaan seperti yang dimaksud. Oleh karena itu, upaya penataan kembali sistem kehidupan berbangsa secara mendasar dilakukan dengan mencari rumusan baru yang diharapkan bisa menjamin tegaknya demokrasi, keadilan, HAM, toleransi serta pluralisme. Diantara sumber utama rumusan itu, agama (Islam) menjadi rujukan yang sangat penting. Setelah sekian lama, ada keengganan menjadikan agama sebagai rujukan validitas pandangan hidup sosial politik. Oleh karena itu, dalam

persoalan penting yang menjadi tekanan bukan membicarakan penyikapan agama terhadap konsep "masyarakat madani" tetapi mencoba memaparkan dasar-dasar teologis filosofis tentang elemen utama " masyarakat madani" yang ada dalam wawasan Islam dan juga pengalaman praktis dalam sejarah masyarakat muslim. Karena itu sikap budaya (*cultural attitude*) dan sikap keagamaan (*religious attitude*) serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia (*human rights*) merupakan unsur yang sangat penting untuk dibicarakan. Selain itu, aspek penting lainnya yang juga perlu dibicarakan adalah mengenai wawasan Islam tentang politik, yang memberikan nilai-nilai dasar kehidupan berdemokrasi. Semua elemen ini menjadi pilar penting tegaknya institusi sosial yang menjamin munculnya "masyarakat madani".⁶

Sudah menjadi kewajiban kita untuk ikut serta ambil peran dalam usaha bersama bangsa kita wujudkan masyarakat berperadaban, masyarakat madani, *civil society*, di Negara kita tercinta Republik Indonesia. Sebab terbentuknya masyarakat madani adalah bagian mutlak dari ciri-ciri kenegaraan yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷ Adalah Nabi Muhammad sendiri yang memberi teladan kepada umat manusia kearah pembentukan masyarakat berperadaban. Setelah belasan tahun berjuang di kota Makkah tanpa hasil yang terlalu menggembirakan, Allah memberinya petunjuk untuk hijrah ke Yastrib kota *Wahah* atau Oase yang subur, sekitar 400 km sebelah

⁶Ahmad Jainuri, *Agama dan Masyarakat Madani : Rujukan Khusus Tentang Sikap Budaya, Agama, Politik*. Sebuah pengantar untuk Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun : Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurkholis Madjid*, (Yogyakarta , LP2IF dan Pustaka Pelajar, 2001), cet. 1., hlm. 5

⁷lebih jelasnya mengenai tujuan berdirinya negara Indonesia, baca, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, pada bagian pembukaan, kompas, 12 Agustus 2002, hlm. 30

utara Makkah. Sesampainya di Yastrib, setelah perjalanan sehari-hari yang amat melelahkan dan penuh kerahasiaan, Nabi disambut oleh penduduk kota itu, dan para gadisnya menyanyikan sebuah lagu "*Thala'al-badr'alaina*" (bulan purnama telah menyingsing diatas kita). Untaian lagu dan syair yang kelak menjadi amat terkenal diseluruh dunia. Kemudian setelah mapan dalam kota hijrah itu, Nabi mengubah kota Yastrib menjadi *Madinah*, artinya "kota" secara konvensional.

Perkataan Madinah memang diartikan "kota" tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung makna "peradaban". Karena itu, tindakan Nabi mengubah Yastrib menjadi Madinah, pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan, niat atau proklamasi, bahwa beliau bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Anshor hendak mendirikan dan membangun atau mengembangkan masyarakat yang beradab. Setelah menetap di Madinah itulah Nabi bersama unsur-unsur penduduk Madinah secara konkrit meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan menggunakan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertamakalinya diperkenalkan antara lain pada wawasan kebebasan terutama di bidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab sosial dan politik. Selama sepuluh tahun Nabi membangun masyarakat berperadaban di Madinah. Beliau membangun masyarakat adil, terbuka, dan demokratis dengan landasan taqwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya.⁸ adapun tahap-tahap yang dilakukan Rosulullah dalam

⁸Baca, Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta, Paramadina, 1999), hlm. 163-169

mengembangkan masyarakat Madinah yaitu apa yang disebut dengan takwin, tanzim, dan taudi'.⁹ *Takwin* adalah tahap pembentukan masyarakat, *tanzim* yakni tahap penataan masyarakat dan pembinaan, dan *taudi'* adalah tahap keterlepasan dan kemandirian.

Masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia itulah masyarakat berperadaban, masyarakat madani, *civil society*. Masyarakat madani yang dibangun Nabi itu oleh Robert N. Bella, ahli sosiologi agama terkemuka, disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya yang sangat modern, bahkan terlalu modern, sehingga setelah Nabi sendiri wafat itu tidak bertahan lama, Timur Tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti yang dirintis Nabi. Setelah Nabi wafat masyarakat madani warisan Nabi itu yang antara lain bercirikan egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan *prestice* seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan - hanya berlangsung selama tiga puluh tahun masa *al-khulafa' ar-syidin* (empat khalifah sesudah Rosulullah, Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali). Sesudah itu, sistem sosial madani digantikan dengan sistem yang lebih diilhami oleh semangat kesukuan atau tribalisme Arab pra-Islam, yang kemudian dikukuhkan dengan

⁹Lebih jelasnya baca; Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam ; Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung , Rosda Karya, 2001), hlm. 31-35

sistem dinasti keturunan atau geneologis. Begitulah keadaan dunia Islam terus menerus hanya mengenal sistem dinasti geneologis sampai datangnya zaman modern sekarang. Sebagian negeri muslim menerapkan konsep Negara republik, dengan presiden dan pimpinan lainnya yang dipilih. Karena itu, justru dalam zaman modern inilah, prasarana sosial dan cultural masyarakat madani yang dahulu tidak ada pada bangsa manapun di dunia, termasuk bangsa Arab, mungkin akan terwujud. Maka, kesempatan membangun masyarakat madani, menurut teladan Nabi justru lebih besar pada masa sekarang ini.¹⁰

Di Indonesia sejak pasca runtuhnya rezim otoriter orde baru menimbulkan sebuah perubahan-perubahan tatanan sosial kemasyarakatan. Tidak terkecuali seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, kebudayaan bahkan tuntutan reformasi cara keberagamaan. Yang sangat krusial disini menyangkut persoalan *nasionalisme*, disintegrasi dan *state nation* yang menjunjung nilai-nilai keadilan sosial, hukum dan nilai kemanusiaan. Perubahan-perubahan yang disponsori oleh pergerakan besar reformasi. Yang akhirnya tercetuslah sebuah ide membentuk masyarakat madani (civil society) dalam konteks ke-Indonesiaan. Akhirnya menjadi isu sentral Negara bangsa kontemporer yang didukung oleh para elit politik Indonesia. Tatkalah isu istilah masyarakat madani telah menjadi wacana meluas, tak ketinggalan cendekiawan muslim Indonesia Nurcholis Madjid menyumbangkan pemikirannya untuk

¹⁰Muhammad Amin Rais, Dkk, *Jika Rakyat Berkuasa : Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal*, (Bandung , Pustaka Hidayah, 1999), hlm.324

menghiasi dan menyponsori paradigma istilah masyarakat madani yang berkembang di Indonesia.

Pandangan Nurcholis Madjid tentang masyarakat madani dalam konteks ke-Indonesiaan ini, dipaparkan dengan perbandingan mengadopsi perilaku "umat klasik yang shaleh" (*al-salaf al-shalih*). Menurut Nurcholis Madjid masyarakat madani di Indonesia dapat diaplikasikan dengan bercermin pada cara kehidupan masyarakat madinah untuk membentuk negara bangsa yang universal. Menurut Nurcholis Madjid yang dipersoalkan dengan pengertian istilah masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban sebagaimana di bangun Rosulullah saw selama sepuluh tahun di madinah. Yaitu masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan taqwa kepada Allah dan taat pada ajaran-Nya. Taqwa dalam arti semangat ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam istilah kitab suci semangat *Rabbaniyah*¹¹ dan *ribbiyah*.¹² Inilah tali hubungan dengan Allah, hablum minallah, dimensi vertikal hidup manusia agar tidak jatuh hina dan nista. Semangat rabbaniyah atau ribbiyah itu, cukup luas dan sejati sehingga padanya terpancar pula semangat kemanusiaan dalam dimensi horizontal, hablum minannas, yang

¹¹Al-qur'an surat. Ali Imran ayat 79. artinya : "Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al-Kitab hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia" Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah akan tetapi (dia berkata) : "hendaklah kamu menjadi orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Lihat Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta, Depag RI, 1983), hlm. 89

¹²Al-qur'an surat Ali-Imran ayat 146. artinya : "Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertaqwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah pada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar, lihat Al-qur'an dan terjemahannya, (Jakarta, Depag RI, 1983), hlm. 100

memancarkan hubungan antar manusia yang penuh budi luhur.¹³ Berdasarkan teladan pada Rasulullah dalam membangun masyarakat madinah itulah Nurkholis Madjid berkeinginan mengembangkan konsep masyarakat madani terhadap bangsa Indonesia. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu tentang konsep masyarakat madaninya Nurcholis Madjid dan bagaimana prospek pembentukannya dalam masyarakat khususnya masyarakat Indonesia

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas maka, secara lebih rinci, permasalahan yang akan dikaji dalam studi pemikiran ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemikiran Nurkholis Madjid tentang konsep masyarakat madani?
2. Bagaimana prospek pembentukan masyarakat madani di Indonesia dalam pandangan Nurcholish Madjid ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran Nurkholis Madjid tentang konsep masyarakat madani ?

¹³Baca, Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, Dalam Jurnal Ulumul Qur'an.

2. Untuk mengetahui bagaimana prospek pembentukan masyarakat madani di Indonesia menurut Nurcholish Madjid

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosial- politik dan kemasyarakatan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Dalam kaitannya tentang konsep masyarakat madani ini, banyak sekali kita jumpai literatur-literatur yang telah membahas dan membicarakannya. Akan tetapi pada umumnya masih bersifat teoritis dan belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat atau belum masuk pada tahap penerapan dari konsep masyarakat madani tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Muhammad Dawam Raharjo dalam buku, *Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, menyatakan bahwa mengenai masyarakat madani harus ditarik keakar sejarahnya yaitu "Negara Madinah", yang didirikan Nabi Muhammad saw. Secara historis "masyarakat madani" bersifat urban, kota, dan jika dibandingkan dengan masyarakat *Badui* yang selalu berkelana, berperadaban yang halus (*civilized*). Secara normatif " masyarakat madani" yang

islami ini boleh juga digambarkan sebagai *khairu ummah* (umat terbaik). Al Qur'an menyebutkan ada dua macam masyarakat pada masa Nabi Muhammad. *Pertama*, adalah masyarakat Badui atau masyarakat nomaden yang kehidupannya mengembara dan praktis belum membentuk suatu masyarakat yang menetap. *Kedua*, adalah masyarakat madani, yang telah menetap di suatu tempat tertentu dan merasa dirinya menjadi bagian dari suatu kesatuan, keadaan menetap tersebut memungkinkan mereka menyepakati suatu tata cara hidup tertentu yang oleh Rousseau disebut *le contract sociale* atau perjanjian kemasyarakatan.¹⁴

Dalam bukunya yang termasyhur " *Essay on the History of Civil Society*", Adam Ferguson menjelaskan beberapa ciri civil society (masyarakat madani). *Pertama*, masyarakat yang hidup di kota (konsentrasi pemukiman) dan cara hidup orang kota. *Kedua*, memiliki kode hukum atau perundang-undangan sebagai dasar pergaulan sosial, ekonomi, dan politik. *Ketiga*, memiliki prilaku yang berdasarkan kesopanan (mempertimbangkan yang patut atau tidak patut dilakukan, menghindari diri dari sikap dan prilaku yang tercela), menghormati orang lain dan memperhalus ucapan (pada saat tertentu). Dan *keempat*, melakukan kerjasama antara sesama warga masyarakat berdasarkan aturan-aturan dan pranata-pranata yang disepakati, dengan perkataan lain, "masyarakat madani" adalah masyarakat yang berkeadaban atau berbudaya, masyarakat yang mampu mengatur dirinya sendiri yang pada masa-masa lalu disebut sebagai masyarakat kota yang memiliki pola hidup dan sifat-sifat perkotaan (urbanity), sejalan dengan pengertian *al-Madinah* atau kota dan *al-Madinah al-Mumawwarah*, kota cahaya, yaitu kota

¹⁴Dawam Raharjo, *op cit.*, hlm. 124

setelah terbentuknya apa yang dikenal oleh orientalis Barat sebagai "Konstitusi Madinah", kemudian kota Madinah yang disebut juga kota Nabi (al-Madinah al-Nabi) itu adalah sebuah tata pergaulan yang berpedoman kepada wahyu Ilahi, yang tidak saja berisi ajaran-ajaran moral tentang yang baik dan buruk, yang benar dan salah, serta yang indah dan yang jelek, tetapi juga sebuah kode hukum.¹⁵

Maswadi Rauf dalam tulisannya "*Masyarakat Madani (civil society) : Akar Demokrasi di Indonesia*" mengemukakan agar demokrasi dapat berkembang dengan baik, terlebih dahulu harus terbentuk masyarakat yang mandiri, bebas, sukarela, taat pada peraturan yang berlaku, dan berfungsi sebagai pengawasan terhadap Negara. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang terlepas dari kendali Negara sehingga Negara tidak mendikte masyarakat untuk berbuat sesuai dengan keinginan penguasa Negara atau pemerintah belaka. Sebaliknya, masyarakat mampu menentukan keinginannya sendiri sesuai dengan pandangan yang berkembang dikalangan warga masyarakat. Justru, masyarakat madani mengandung pengertian bahwa kemandirian masyarakat menghasilkan kedudukan masyarakat yang lebih dominan dibanding dengan Negara.¹⁶

Adapun pengertian bebas dan suka rela mengandung pengertian bahwa masyarakat haruslah bisa menikmati berbagai jenis kebebasan misalnya kebebasan berbicara, berkumpul, membentuk organisasi, atau bergabung kedalam berbagai organisasi pilihan mereka sendiri. Sifat kesukarelaan penting karena

¹⁵Adam Ferguson, *Essay on the History of Civil Society*, sebagaimana dikutip oleh Dawam Raharjo, dalam bukunya, *Ibid*, hlm. 124

¹⁶Mawasdi Rauf, *Masyarakat Madani (Civil Society): Akar Demokrasi di Indonesia*, dalam bukunya, "*Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Cultur Feodal*", (Bandung, Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 297

masyarakat madani mensyaratkan adanya pilihan bebas dari warga Negara dalam setiap kegiatan mereka, yang tentu saja kesukarelaan itu bertentangan dengan cara-cara paksaan dan mobilisasi yang biasa dilakukan oleh Negara untuk kepentingan politik, penguasa politik (Negara). Kesukarelaan ini sangat kondusif bagi keberhasilan usaha warga masyarakat, karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing.

Dan keterikatan pada peraturan perundangan yang berlaku merupakan unsur yang penting dalam masyarakat madani, karena keteraturan dan penegakan hukum adalah dasar dari masyarakat madani, dengan demikian kebebasan dan kemandirian warga masyarakat yang ingin dikembangkan oleh masyarakat madani tidaklah berarti kebebasan mutlak dimana setiap orang dapat melakukan apa saja yang diinginkannya.

Sedangkan yang terakhir masyarakat madani adalah masyarakat yang mampu menjadi alat pengawasan terhadap Negara. Masyarakat adalah pengawas terakhir dan tertinggi terhadap tingkah laku Negara atau penguasa politik atau pemerintah, masyarakat mengawasi Negara melalui anggota-anggotanya yang vokal dan peduli dengan masalah-masalah bersama, meskipun tidak duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang merupakan lembaga politik formal yang menjalankan fungsi pengawasan politik. Pengawasan oleh masyarakat bersifat terbuka bagi setiap orang yang mau dan mampu memberikan saran dan kritik terhadap pemerintah.

Dari sini terlihat bahwa masyarakat madani mensyaratkan tingkat kemampuan tertentu yang harus dimiliki oleh warga masyarakat. Warga masyarakat dituntut untuk memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi, sehingga mereka memahami masalah-masalah sosial yang jauh lebih rumit dari masalah-masalah pribadi yang langsung mereka hadapi. Oleh karena itu banyak penulis menyebutkan perlunya pendidikan yang memadai, kemampuan ekonomi yang cukup tinggi, dan persebaran media massa yang luas di dalam masyarakat sebagai persyaratan bagi terbentuknya kesadaran politik rakyat. Dengan demikian dari uraian di atas ini terlihat bahwa masyarakat madani menuntut adanya syarat-syarat tertentu yang harus ada dalam diri sebagian besar warga masyarakat agar ciri-ciri masyarakat madani dapat terwujud. Dengan modal ini pemberdayaan (pengembangan) masyarakat akan terwujud, yakni terbentuknya kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan mereka, meskipun bertentangan dengan kepentingan dan keinginan pemerintah

Dalam pandangan Azumardi Azra bahwa masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan-gerakan pro-demokrasi. Masyarakat madani juga mengacu kehidupan masyarakat yang berkualitas dan bertamaddun (civility) civitas meniscayakan toleransi, yakni kesadaran individu-individu untuk menerima berbagai pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Itu berarti tidak ada satu pihak manapun termasuk pemerintah dan gerakan-gerakan pro-demokrasi, yang berhak memaksakan aspirasi dan kemauannya sendiri, apakah dengan bentuk kooptasi, regimentasi, apalagi dengan hura-hura yang pada gilirannya

menimbulkan *lawlessness* dan *social costs* yang sering amat mahal. Sebab itu, seluruh sektor masyarakat terutama gerakan kelompok, dan individu-individu independen yang *concerned* dan *committed* pada demokratisasi dan masyarakat madani seyogyanya mengambil strategi yang lebih subtil, halus, bertamaddun, bukan mengambil jalan konfrontasi langsung yang tidak mustahil akan mengorbankan aktor-aktor masyarakat madani itu sendiri.¹⁷

Menurut As Hikam, *civil society* dalam konteks ke-Indonesiaan diterjemahkan dengan istilah masyarakat madani harus dimengerti sebagai suatu proses yang bisa mengalami pasang surut, kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan kelemahan dalam perjalanan sejarahnya. Sehingga perlu dijelaskan bahwa *civil society* didalam konteks ke-Indonesiaan adalah suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik, sehingga mampu membatasi kekuasaan Negara yang berlebih-lebihan. Muhammad AS Hikam mensinyalir *civil society* akan tersosialisasi di Indonesia dengan syarat pemikir-pemikir, politisi, cendekiawan dan termasuk mahasiswa harus mampu tampil sebagai pioneer pemberdayaan *civil society*, yakni menciptakan pemikiran alternatif bagi masyarakat yang memiliki jangkauan masa depan.¹⁸

Dalam pandangan Loekman Soetrisno dalam karyanya "*Menuju Masyarakat Partisipatif*" menyatakan bahwa tanpa terbentuknya suatu *civil society* maka pembangunan di Indonesia akan kehilangan makna emansipatifnya dan dengan demikian mungkin harus menghadapi banyak kesulitan dalam

¹⁷Lihat Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani ; Gagasan, Fakta, dan Tantangan*, (Bandung, Rosdakarya, 2000), hlm. 5

¹⁸Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta, LP3ES, 1996), hlm. 8

usahanya lebih lanjut untuk memberantas kemiskinan dan menciptakan pemerataan.¹⁹ Menurut Affan Ghofar, civil society di Indonesia sosialisasinya masih belum dapat ditemukan karakter sesungguhnya, alasannya, karena masyarakat Indonesia baru saja atau tengah menghadapi proses transformasi sosial, disatu pihak, dan dipihak lain, kekuasaan Negara sangat vis a vis terhadap masyarakat.²⁰

Dalam pandangan Nurcholis Madjid, masyarakat madani yang dapat dikembangkan di Indonesia haruslah bersifat inklusif, disamping harus berkiblat pada kehidupan masyarakat Rosulullah, juga mengambil sebuah perbandingan civil society yang berkembang di Barat. Nurkholis Madjid menafsirkan bukanlah suatu kebetulan bahwa wujud nyata masyarakat madani itu pertama kali dalam sejarah umat manusia merupakan hasil usaha utusan Tuhan untuk akhir zaman, Nabi Muhammad saw. Sesampainya Nabi di kota hijrah yakni Yastrib (Yunani; Yethroba); beliau ganti nama itu menjadi Madinah. Dengan tindakan itu Nabi saw telah merintis dan memberi teladan kepada manusia dalam membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang berperadaban (ber"madaniyah") karena tunduk dan patuh (Dana-Yadinu) kepada ajaran kepatuhan (Din).²¹

Dengan demikian civil society atau masyarakat madani yang berperadaban, dapat diartikan sebagai masyarakat yang utuh (solid) dimana

¹⁹Loekman Soetrisno, *Memuju Masyarakt Partisipatif*, (Yogyakarta, Kanisius, 1995), hlm. 48

²⁰Affan Ghofar, *Politik Indonesia: Transisi Memuju Demokrasi*, (yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002), Cet. III, hlm. 185-187

²¹Lihat Nurkholis Madjid Dkk. *Puasa Titian Memuju Rayyan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 125

kemajemukan dan kebersamaan sangat dihormati sebagai konsep kemasyarakatan. Semua Negara dan bangsa di dunia pada dasarnya berhak berbicara dan berencana tentang masyarakat madani sesuai kepentingannya masing-masing. Namun secara kontekstual, masing-masing bangsa punya karakteristik dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Konsep masyarakat madani untuk Indonesia punya karakteristik dan ciri khas yang membedakannya dari masyarakat yang dicita-citakan bangsa lain, dan dapat dirumuskan secara sederhana perspektif masyarakat madani di Indonesia yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan taqwa kepada Allah dalam arti semangat ketuhanan yang Maha Esa. Ditambah legalnya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur, seperti toleransi dan juga pluralisme. Sebab toleransi dan pluralisme adalah wujud ikatan keadaban (*bond of civility*).²²

Dari kajian pustaka yang telah dilakukan sejauh pengetahuan penulis masih sedikit sekali yang membahas tentang konsep masyarakat madani Nurcholis Madjid dan pembentukannya dalam masyarakat, salah satunya yang penulis ketahui Sufyanto dalam bukunya "Masyarakat Tamaddun" yang telah membahas dan mengadakan kritik tentang konsep masyarakat madani Nurcholis Madjid ini dengan pendekatan filsafat dan menggunakan metode kritik hermeneutis. Dengan menggunakan pendekatan ini, ia akhirnya memperoleh kesimpulan bahwa konsep masyarakat madani Nurcholish Madjid itu lebih pantas

²²Baca, Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta, Paramadina, 1999), hlm. 163-180

disebut sebagai masyarakat tamaddun (beradab) karena berorientasi dari masyarakat islam yang dibangun Nabi Saw di Madinah waktu itu.

Akan tetapi sekali lagi semua yang dilakukan Sufyanto masih pada tataran teoritis, sehingga bedanya dengan penulis adalah penulis di samping mengadakan penelitian secara teoritis, penulis juga berusaha untuk meneliti bagaimana konsep ini bisa dapat terealisasi dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.

Dengan demikian bahwa pembahasan pemikiran Nurcholis Madjid tentang konsep masyarakat madani ini masih menarik untuk dikaji dan diadakan suatu penelitian.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (library research), dalam arti semua sumber data berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, majalah, jurnal, ensiklopedi, surat kabar dan lain sebagainya. Karena penelitian ini mengkaji bagaimana ide, pandangan atau pendapat Nurcholis Madjid tentang masyarakat madani, maka sumber primer penelitian ini adalah karya-karya Nurcholis Madjid sendiri yang telah termaterialkan (baik berupa buku-buku, jurnal ataupun masih berbentuk makalah) yang masih ada hubungannya dengan pembahasan masyarakat madani ini, antara lain adalah; Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi; Islam Kemodernan dan Keindonesiaan; Islam*

Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansinya Doktrin Islam Dalam Sejarah; Islam Kerakyatan dan Keindonesian; Menuju Masyarakat Madani, dan lain sebagainya..

Sedangkan yang dimaksud sumber sekunder adalah adalah sumber pendukung dari sumber pokok. Yakni sumber referensi dari tulisan orang lain, akan tetapi ada kaitanya dengan kajian penelitian menyangkut konsep masyarakat madani pemikiran Nurcholish Madjid, baik yang sifatnya kritik, kontra ataupun mendukung. Diantara sumber sekunder itu antara lain: Azyumardi Azra', *Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan*; Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*; Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun, Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, dan lain sebagainya.

Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif yaitu metode yang berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dan berusaha memahami dan menfsirkan makna menurut perspektif sendiri.²³ Dalam hal ini penulis mengadakan pengkajian lebih mendalam terhadap konsep masyarakat madani menurut pandangan Nurcholish Madjid

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu pertama-tama dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan

²³Husaini Usman, Purnomo Setrady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), cet. I, hlm. 81

menggambarkan atau menjelaskannya dan kemudian dianalisa.²⁴ Dengan demikian pertama penulis mengumpulkan atau menyusun data yang diperlukan tentang masyarakat madani menurut Nurkholis Madjid dan yang berkaitan dengannya, digambarkan atau dijelaskan bagaimana pandangan Nurkholis Madjid tentang masyarakat madani kemudian dianalisa dan dari data analisa yang diperoleh tersebut, penulis menarik kesimpulan daripadanya tentang konsep masyarakat madani Nurkholis Madjid ke dalam suatu kesimpulan yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan berbagai hal diatas untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap kajian itu serta memperoleh gambaran yang jelas dan terarah secara sistematis maka pembahasan dalam penelitian ini akan tersusun sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah biografi Nurkholis Madjid, yang meliputi riwayat hidup dan pendidikan Nurkholis Madjid, kehidupan keagamaan, politik, dan kondisi sosial ekonomi yang melatar belakangi pemikirannya, beberapa tokoh pemikir yang mempengaruhinya dan corak pemikirannya, serta karya-karya intelektualnya.

²⁴Winarno Surachman, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung; C.V Tarsito, 1972), hlm. 132

Bab ketiga berisi tentang masyarakat madani dan prospek pembentukannya di Indonesia yang meliputi; konsep masyarakat madani Nurcholis Madjid, pengertian masyarakat madani, karakteristik masyarakat madani, prospek pembentukan masyarakat madani di Indonesia, dan relevansinya dengan pemikiran Nurcholis Madjid

Bab keempat (bagian akhir) yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian-kajian yang komprehensif, kritis, dan analitis terhadap konsep masyarakat madani Nurcholish madjid, dengan menggunakan metode deskriptif analitis, maka ditemukanlah makna konsep masyarakat madani beserta prinsip-prinsipnya dan relevansi pembentukan masyarakat madani di Indonesia menurut pandangan Nurcholish madjid. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut

Pertama, pemikiran Nurcholish Madjid tentang masyarakat madani dalam perspektif keindonesiaan dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, terbuka, dan demokratis dengan landasan taqwa kepada Allah Swt, dalam arti semangat Ketuhanan Yang Maha Esa (Ribbiyah dan Rabbaniyyah), ditambah legalnya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur, seperti demokrasi, pluralisme, toleransi, HAM, dan keadilan. Sebab semua itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadaaban atau masyarakat madani itu sendiri.

Kedua, relevansi pemikiran Nurcholish Madjid tentang Masyarakat Madani dalam upaya membangun masyarakat menuju masyarakat madani atau masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis menurut teladan Nabi, tidak bisa ditawar lagi pelaksanaannya khususnya di Indonesia karena sarana dan prasarana sosial-kultural sudah memungkinkan untuk dapat mewujudkannya

disatu sisi, dan pada sisi lain memang bangsa Indonesia memerlukannya untuk mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik. Maka dari itu pembentukan masyarakat madani khususnya di Indonesia menurut Nurcholish Madjid harus segera dilaksanakan dengan berorientasi pada teladan Nabi dalam membangun dan membentuk masyarakat Madinah waktu itu.

B. Saran-saran

Pertama, konsep masyarakat madani yang saya tulis merupakan salah satu dari sekian banyak tulisan yang sudah cukup banyak berkembang di dalam masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan untuk terus dikembangkan menjadi pemikiran-pemikiran yang senantiasa aktual serta diminati oleh setiap lapisan masyarakat, baik sekarang maupun yang akan datang.

Kedua, untuk lebih memberi suatu makna yang mendalam serta lebih bisa diterima oleh setiap lapisan masyarakat, perlu kiranya dalam hal ini dicari rujukan-rujukan referensi yang lebih banyak lagi, dengan ketentuan seperti apa yang saya uraikan sebelumnya, ia harus bersifat obyektif, dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, bukan suatu karya yang ngawur dan asal-asalan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Karya-karya Nurcholish Madjid

Madjid, Nurcholish, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Cet. I, Jakarta;

Paramadina, 1999.

-----, *Memuju Masyarakat Madani*, Jurnal Ulumul Qur'an, No 2
Vol. III, 1999.

-----, *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi
Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta; Paramadina, 2000

-----, *Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Kompas, 24 Mei 2003

-----, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang
Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*,
Jakarta; Paramadina, 1992

-----, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Cet. XII, Bandung,
Mizan, 1999.

-----, *Tradisi Islam; Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di
Indonesia*, Jakarta; Paramadina, 1997.

-----, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru
Islam Indonesia*, Jakarta; Paramadina, 1995

-----, *Puasa Titian Menuju Rayyan*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar,
2000

-----, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Budi Munawwar
Rahman (Ed), Jakarta; Paramadina, 1999

B. Karya-karya Penulis Lain

Azra', Azumardi, *Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta dan Tantangan*, Cet 2,
Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000.

Abdullah, Amin, *Falsafah Kalam di Era Post-Modernisme*, Yogyakarta; Putaka
Pelajar, 1995.

AS Hikam, Muhammad, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta; LP3ES, 1996

A. K, Sukandi (Peny), *Prof. Dr. Nurcholish Madjid; Jejak Pemikiran dari
Pembaharu sampai Guru Bangsa*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, Cet.2,
2003.

Cipto, Bambang, *Bebek Dunggu, Presiden Profesional atau Politik Dinasti*,
Yogyakarta; Bigraf Publishing, 1999.

Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya*, Surabaya; Mahkota, 1989

Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta; Merthon Putra, 1992

Gaffar, Affan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Cet, III,
Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002.

Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Muhammmad
Abdul Ghoffar, (Penerjh), Cet, I, Bandung; Mizan, 1996

Idrus, Junaidi, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid; Membangun Visi dan
Misi Baru Islam Indonesia*, Jogjakarta; Logung Pustaka, 2004

- Khan, Qomaruddin (Peny), *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Bandung; Pustaka Pelajar, 1995
- Machendrawati, Nanih, dan Agus, Ahmad Safi'I, *Pengembangan Masyarakat Islam; dari Ideologi, Strategi, Sampai Tradisi*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001.
- Partanto, A. Pius, dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya; Arkola, 1994.
- Rais, Amin, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung; Mizan, 1998
- Rais, Amin, Dkk, *Jika Rakyat Berkuasa; Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal, Cet 1*, Bandung; Pustaka Hidayah, 1999
- Raharjo, Dawam, *Masyarakat Madani; Agama, Kelas Menengah Perubahan dan Sosial*, Jakarta; LP3ES, 1999.
- Rosyada, Dede, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003
- Rahman, Fazlur, *Neo-Modernisme Islam*, Taufik Adnan Amal (Peny), Bandung; Mizan, 1993
- Ratna, Myrna, *Menemukan Sosok Masyarakat Madani Indonesia*, Fokus, 17 Agustus 2003
- Subkhan, Imam (Ed), *Siasat Gerakan Kota ; Jalan Menuju Masyarakat Baru*, Yogyakarta; Solahuddin, 2003

Soetrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta; Kanisius, 1995.

Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun; Kritik hermeneutis Masyarakat Madani Nurkholis Madjid*, Yogyakarta; LP2IF Pustaka Hidayah, 2001.

Salim, Peter, dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta; Modern English Press, 1991.

Sumarsono, (et al), *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cet, 2, Jakarta; Gramedia, 2002

Surachman, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung; CV Tarsito, 1972



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA